

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

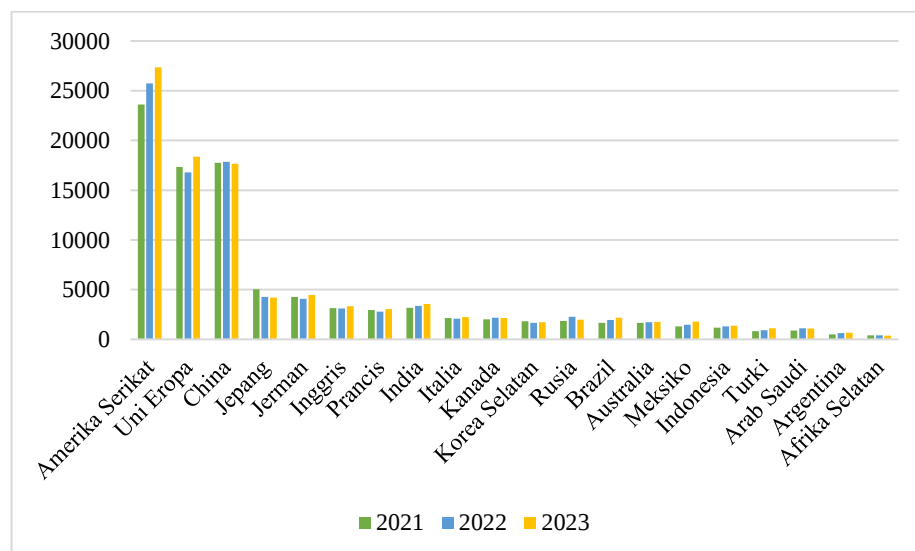
Komponen kunci yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan suatu negara adalah pertumbuhan ekonominya. Fenomena pertumbuhan ekonomi telah menjadi suatu parameter yang selalu diperhatikan dalam mengukur pembangunan dan menggambarkan kondisi ekonomi setiap negara. Suatu negara dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi kenaikan pendapatan nasional dan peningkatan *output*. Kenaikan pendapatan nasional tersebut dapat dilihat dari besarnya jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan setiap tahunnya.

Pertumbuhan ekonomi bisa juga diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2010). Sedangkan menurut Prof. Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi menunjukkan bagaimana suatu perekonomian dapat menghasilkan pendapatan bagi masyarakat dengan menggunakan beberapa faktor produksi sehingga *output* yang dihasilkan dapat menjadi roda penggerak suatu perekonomian dalam kurun waktu tertentu.

Robert Solow dan Trevor Swan dalam teori pertumbuhan ekonomi neo-klasik menjelaskan bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil didorong dan dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi seperti penambahan modal, peningkatan kapasitas dan kapabilitas tenaga kerja, serta kemajuan teknologi. Teori ini menekankan pentingnya akumulasi modal melalui investasi dalam aset fisik baru sebagai salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, teknologi dilihat dari peningkatan *skill* atau kemajuan teknik sehingga produktivitas meningkat (Pamungkas & Hayati, 2023).

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi sesuai dengan teori tersebut yaitu investasi asing, pengeluaran pemerintah, *financial deepening* atau pendalaman keuangan, dan tenaga kerja. Dengan adanya investasi akan menambah pembentukan stok barang modal yang akan membawa ke arah kemajuan dan inovasi teknologi, kemudian akan menciptakan produk dan layanan baru yang meningkatkan kesempatan kerja. Selain itu, adanya modal yang memadai akan menarik investasi asing karena hal tersebut mengindikasikan bahwa suatu negara memiliki infrastruktur yang memadai untuk keberlangsungan kegiatan ekonomi. Pendalaman keuangan juga merupakan faktor yang dapat mendorong investasi lebih tinggi dengan meningkatkan peranan, kegiatan, dan jasa-jasa keuangan terhadap ekonomi. Faktor-faktor tersebut pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan nasional dan memicu pertumbuhan ekonomi.

Pada era globalisasi yang membawa dunia menjadi semakin terkoneksi, adanya terminologi *the shrinking world* menjadi suatu fenomena yang memicu terjadinya globalisasi dan semakin terhubungnya perekonomian di dunia. Kondisi ini membawa tantangan tersendiri bagi negara-negara di dunia, sehingga sulit bagi mereka untuk menghadapinya secara individual. Kegagalan menghadapi tantangan global yang kompleks berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional maupun global, sehingga kondisi ini mendorong terbentuknya G20 dengan karakteristik pemerintahan global (*global governance*) yang unik dan memiliki mekanisme kepemimpinan bersama (Sudjatmiko et al., 2022). G20 ini berperan utama dalam penciptaan stabilitas ekonomi global, termasuk pencegahan terjadinya krisis finansial. Selain itu, Indonesia dapat memastikan kesepakatan yang dihasilkan pada G20 dapat diimplementasikan untuk kepentingan dan pembangunan nasional.



Gambar 1. 1 GDP Anggota G20 Tahun 2021-2023 (Miliar US\$)

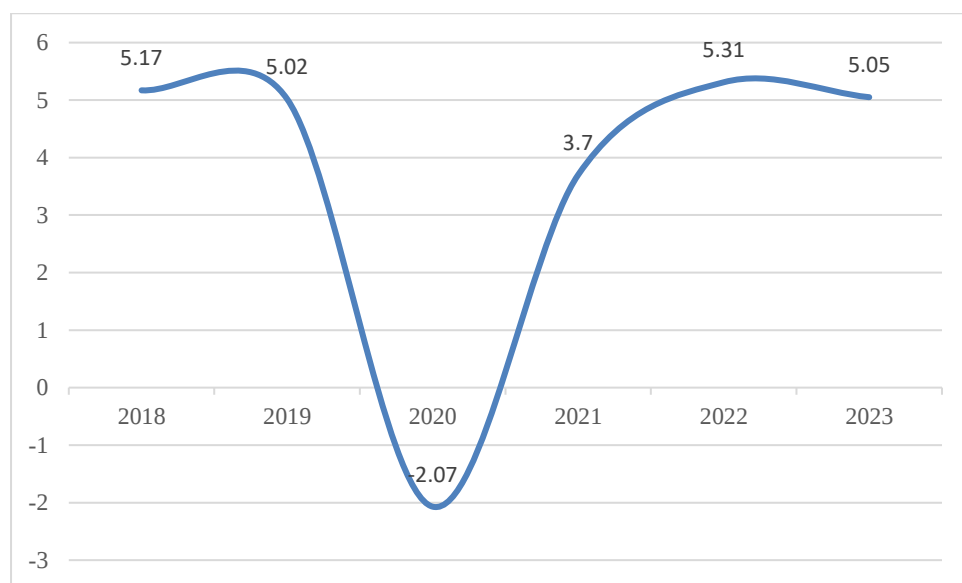
Sumber: *International Monetary Fund (IMF)*, diolah.

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang yang tergabung dalam G20 berada pada posisi ke-16 berdasarkan perekonomian (PDB). Posisi Indonesia ini berada satu peringkat di atas Turki yang berada di posisi ke-17 dan di bawah Meksiko yang berada di posisi ke-15. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara G20 lainnya. Sedangkan Amerika Serikat menjadi negara G20 yang menempati peringkat tertinggi selama 3 tahun berturut-turut. Pada tahun 2021, PDB Amerika Serikat mencapai US\$ 23.594,05 miliar, kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi US\$ 25.744,1 miliar, dan pada tahun 2023 mencapai US\$ 27.357,8 miliar. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat dengan mata uangnya yaitu dolar AS mendominasi di segala aspek keuangan global sekaligus menjadi penguasa ekonomi dunia.

Sementara itu, Indonesia yang berada pada posisi ke-16 memiliki PDB mencapai US\$ 1.186,51 miliar pada tahun 2021, kemudian meningkat pada tahun 2022 mencapai US\$ 1.319,08 miliar, dan US\$ 1.371,17 miliar pada tahun 2023. Meskipun mengalami peningkatan, namun Indonesia masih berada jauh di bawah negara-negara lainnya seperti Amerika Serikat, China, dan Jepang. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 mengakibatkan perekonomian Indonesia terganggu pada tahun tersebut dan tahun-tahun selanjutnya.

Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi menjadi isu yang sering dibicarakan. Masalah pertumbuhan ekonomi ini menjadi perhatian karena memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan juga dapat dipandang sebagai

masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Hal tersebut mengharuskan pemerintah dan pelaku ekonomi lainnya untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap stabil. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi pada tingkat rata-rata yang moderat yaitu sekitar 5 sampai 7 persen, tetapi dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan yang cukup dalam.



Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2018-2023 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 berfluktuasi. Pada tahun 2018, perekonomian Indonesia berada pada angka 5,17 persen. Selanjutnya pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 5,02 persen, lebih rendah dari tahun 2018. Kemudian angka pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sangat signifikan pada tahun 2020 yang menyentuh angka -2,07 persen, hal ini menyebabkan pergerakan ekonomi yang tidak stabil karena adanya pandemi

Covid-19 serta pembatasan sosial yang berdampak pada terbatasnya aktivitas perekonomian di Indonesia.

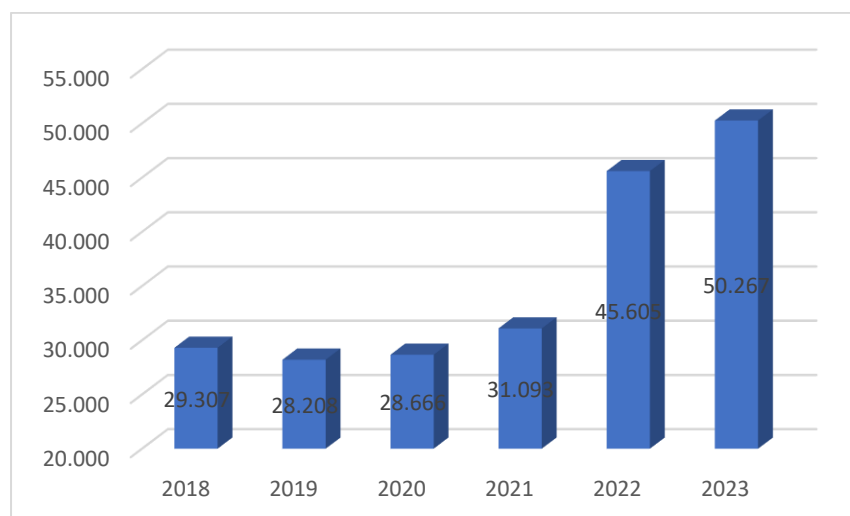
Meskipun masih dalam kondisi pandemi, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2021, yakni mencapai 3,70 persen. Pada tahun 2022, perekonomian Indonesia tumbuh solid di angka 5,31 persen yang merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2014. Pada tahun tersebut, pertumbuhan ekonomi terjadi di seluruh lapangan usaha, stabilitas konsumsi masyarakat terjaga, serta investasi secara bertahap juga menguat yang didukung oleh kebijakan penanganan pandemi. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan menjadi 5,05 persen yang dipicu oleh melambatnya ekonomi global serta adanya fenomena El Nino yang berdampak pada pertumbuhan lapangan usaha pertanian melambat.

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki karakteristik yang tidak berbeda jauh dengan negara berkembang lainnya dalam hal mencapai pertumbuhan ekonomi yang dihadapkan dengan keterbatasan modal untuk investasi pembangunan (Mukhlis, 2015). Investasi memainkan peran penting dalam menggerakkan perekonomian suatu negara dengan penyaluran modal yang akan meningkatkan produksi dan membuka lapangan pekerjaan baru. Penanaman modal ini merupakan langkah awal untuk melakukan pembangunan dan menjadi salah satu fokus penting pemerintah.

Berdasarkan survei *CEO World Magazine* dalam BKPM (2020), kondisi penanaman modal Indonesia menempati peringkat ke-4 dari 67 negara sebagai negara yang memiliki daya tarik kuat di bidang investasi dengan skor 84,4.

Kebijakan pemerintah menjadi indikator tertinggi dalam survei tersebut, hal ini menunjukkan bahwa formula kebijakan pemerintah di bidang investasi memegang peranan penting dalam menentukan potensi peningkatan penanaman modal.

Selain penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing pun memiliki peranan penting dalam melengkapi kebutuhan investasi di Indonesia. Kehadiran penanaman modal asing tersebut akan memacu pertumbuhan ekonomi dengan menjadi media transfer teknologi dari luar negeri sehingga akan meningkatkan daya saing secara internasional bagi perusahaan domestik. Penelitian yang dilakukan oleh Kaddouri & Benelbar (2024) menyatakan bahwa PMA memiliki dampak positif dan saling berintegrasi terhadap pertumbuhan ekonomi, hal tersebut mengindikasikan adanya hubungan jangka panjang di antara keduanya. Dengan demikian, pemerintah harus lebih meningkatkan peranannya dalam meningkatkan investasi sehingga dapat menarik lebih banyak lagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.



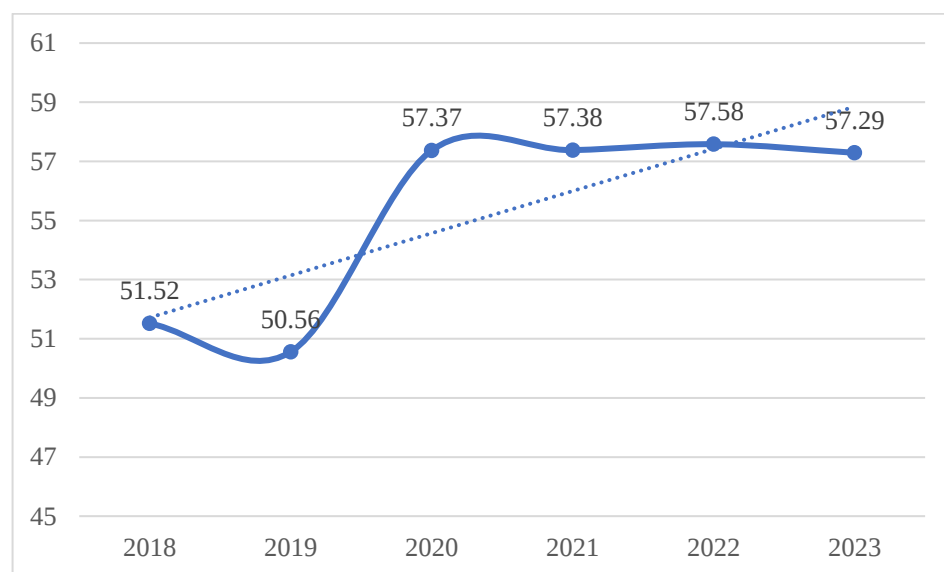
Gambar 1. 3 Realisasi PMA di Indonesia Tahun 2018-2023 (Juta US\$)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan gambar 1.3, dapat dilihat bahwa realisasi penanaman modal asing di Indonesia berfluktuasi. Nilai investasi terendah dalam 6 tahun terakhir terjadi pada tahun 2019 sebesar 28,208 miliar, penurunan investasi asing ini dipicu oleh terpangkasnya aliran modal asing ke negara-negara yang selama ini menjadi pusat investasi dunia seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Turunnya investasi asing ini membuat proporsi investasi domestik mendominasi total investasi. Kemudian pada tahun 2020 sampai tahun 2023 realisasi penanaman modal asing di Indonesia mengalami tren peningkatan secara terus-menerus, dengan nilai investasi tertinggi terjadi pada tahun 2023 mencapai 50,267 miliar. Lima besar negara yang paling banyak berinvestasi di Indonesia pada tahun 2023 adalah Singapura (US\$ 3,4 miliar), Tiongkok (US\$ 2,6 miliar), Hongkong (US\$ 2 miliar), Jepang (US\$ 1 miliar), dan Malaysia (US\$ 800 juta). Dengan peningkatan jumlah realisasi ini menunjukkan keyakinan para investor luar negeri semakin meningkat terhadap kebijakan pemerintah Indonesia khususnya di bidang investasi.

Peranan pemerintah dalam peningkatan investasi dapat dilakukan dengan perbaikan infrastruktur dan melakukan penambahan aset. Pembiayaan pembangunan daerah untuk infrastruktur ini termasuk ke dalam pengeluaran pemerintah yang biasanya disebut dengan belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan investasi untuk mencapai sasaran pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan kata lain, belanja modal akan menghasilkan penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Rizky et al., 2016).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maury et al. (2023) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa di setiap peningkatan pengeluaran pemerintah atau belanja modal dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah dalam konteks belanja modal terutama yang berkaitan dengan pengadaan infrastruktur dapat menyokong pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya mencapai kesejahteraan masyarakat secara merata. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam hal investasi infrastruktur ekonomi harus tetap diarahkan untuk menjaga kegiatan ekonomi secara keseluruhan dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.



Gambar 1. 4 Realisasi Pengeluaran Pemerintah dalam Belanja Modal Indonesia Tahun 2018-2023 (Triliun Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan gambar 1.4, dapat dilihat realisasi pengeluaran pemerintah dalam belanja modal selama 6 tahun terakhir cenderung meningkat. Pada tahun 2018, realisasi belanja modal mencapai 51,52 triliun rupiah. Namun pada tahun

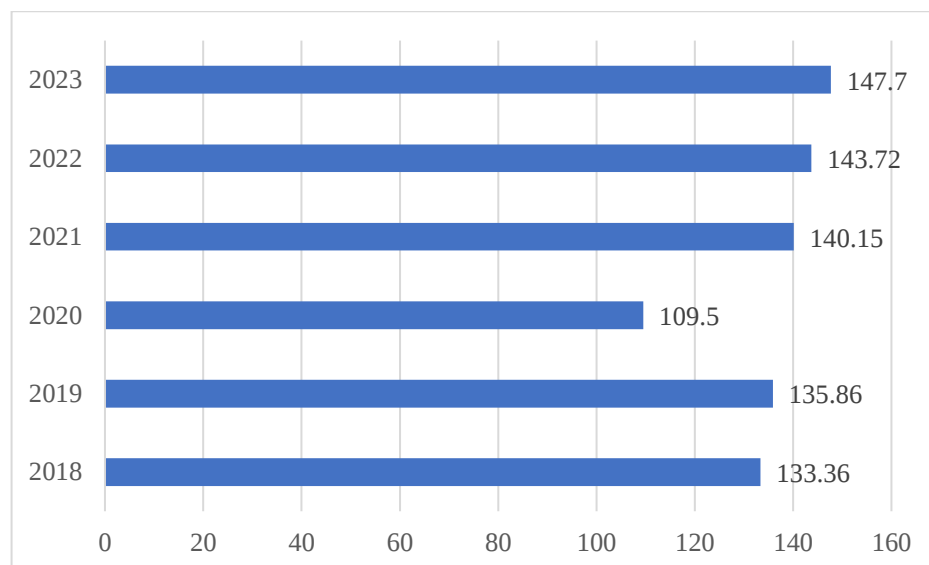
2019 mengalami penurunan menjadi 50,56 triliun rupiah. Tahun 2020 realisasi belanja modal Indonesia melonjak dari tahun sebelumnya mencapai 57,37 triliun rupiah, hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan pemerintah untuk melakukan upaya penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional sekaligus stabilitas sistem keuangan melalui *recofusing* atau pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu pada APBN 2020. Kemudian pada tahun 2021 dan 2022 belanja modal mengalami kenaikan secara berturut-turut sebesar 57,38 triliun rupiah dan 57,58 triliun rupiah. Pada tahun 2023 belanja modal Indonesia mengalami penurunan menjadi 57,29 triliun rupiah dikarenakan adanya upaya pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran.

Belanja modal ini merupakan salah satu jenis belanja negara yang tentunya menjadi fokus kebijakan fiskal dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini sesuai dengan salah satu poin dari Nawa Cita atau sembilan agenda prioritas pemerintah yaitu pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan nantinya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi (Dinan, 2020).

Salah satu produktivitas masyarakat adalah tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan suatu faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja yang besar terbentuk dari jumlah penduduk yang besar. Semakin banyak jumlah penduduk yang dibarengi dengan tingkat pendidikan dan *skill* yang mumpuni akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain,

tenaga kerja akan mempercepat hasil produksi sehingga output yang dihasilkan juga semakin meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Ariska (2023) dan Artina (2022) menunjukkan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa tenaga kerja merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Mengingat pentingnya faktor tersebut, potensi tenaga kerja hendaknya dapat dimanfaatkan dengan baik. Tenaga kerja yang produktif memiliki kemampuan dan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan perekonomian suatu negara secara keseluruhan. Hal ini terkait dengan fakta bahwa produktivitas tenaga kerja tergantung pada ketersediaan kualitas sumber daya tenaga kerja dan teknologi yang diterapkan. Akibatnya, produktivitas tenaga kerja sangat memengaruhi proses dan biaya produksi yang nantinya akan berdampak pada daya saing bangsa di pasar global.



Gambar 1. 5 Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2018-2023 (Juta Jiwa)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan data, tenaga kerja di Indonesia berfluktuasi dan cenderung meningkat. Pada tahun 2018 sampai 2019, jumlah tenaga kerja Indonesia secara berturut-turut mengalami peningkatan. Kemudian pada tahun 2020 tenaga kerja Indonesia mengalami penurunan yang cukup drastis mencapai 109,5 juta orang, hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda sebagian besar negara sehingga membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian. Akibatnya, banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan (PHK) sehingga berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran yang pada akhirnya menurunkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian pada tahun 2021 sampai tahun 2023, tenaga kerja Indonesia kembali mengalami peningkatan secara terus-menerus dengan angka tertinggi pada tahun 2023 mencapai 147,7 juta orang. Pada periode tahun 2021 sampai 2023 jumlah tenaga kerja di Indonesia meningkat sebanyak 7,56 juta orang, hal ini mengindikasikan bahwa semakin bertambahnya ketersediaan pasokan tenaga kerja di Indonesia.

Peningkatan produktivitas tenaga kerja menjadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi secara riil. Sebagai hasil dari ekspansi ekonomi riil, suatu sistem perekonomian membutuhkan lebih banyak perantara keuangan. Dalam konsep ini, sektor keuangan memainkan peran pasif dalam proses pertumbuhan ekonomi (Calderón & Liu, 2003). Sektor keuangan ini dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan investasi dan pembangunan.

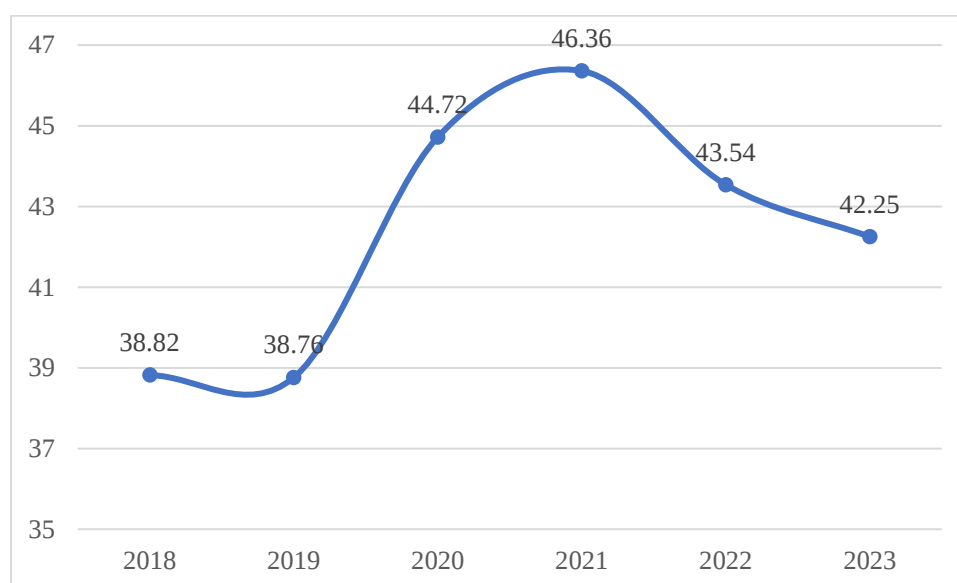
Perkembangan kondisi keuangan Indonesia terus mengalami penyesuaian dalam merumuskan formula yang tepat guna keberlangsungan dan kestabilan

perekonomian di masa mendatang. Hal ini tercermin melalui kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dimana kebijakan liberalisasi keuangan menjadi titik awal dalam menata kebijakan dari sisi keuangan yang diharapkan menjadi salah satu penggerak perekonomian. Di sisi lain, sektor keuangan juga memiliki peran yang sangat strategis, terutama melalui fungsi intermediasi dan penyediaan dana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Menurut Ika (2021), setidaknya ada dua permasalahan pada sektor keuangan di Indonesia saat ini, yaitu inklusi keuangan (*financial inclusion*) yang masih rendah dan pendalaman keuangan (*financial deepening*) yang masih dangkal. Masih banyak penduduk Indonesia yang dikategorikan sebagai *excluded population* atau kelompok yang sulit mengakses layanan keuangan sementara ketergantungan pada perbankan juga sangat tinggi. Hal tersebut memengaruhi kebijakan pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi.

Selain itu, *financial deepening* atau pendalaman keuangan juga merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut Shaw (1973), *financial deepening* merupakan rasio dalam bentuk aset keuangan suatu negara terhadap PDB. Rasio yang umum digunakan yaitu rasio jumlah uang beredar (*broad money*) atau M_2 terhadap PDB. Semakin besar rasio tersebut, maka semakin dalam pula sektor keuangan di suatu negara. Sehingga, dapat dikatakan semakin besar rasio yang ditunjukkan maka semakin efisien pula sistem keuangan dalam mengalokasikan dan memobilisasi dana guna mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara (Putri & Mubin, 2021).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Putra & Irfan (2023) menunjukkan hasil *financial deepening* atau pendalaman keuangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa jika terjadi peningkatan pada pendalaman keuangan maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pendalaman keuangan ini diharapkan dapat meminimalisir dan meringankan kendala masalah keuangan pada masyarakat yang demikian akan mengurangi ketimpangan yang terjadi di kalangan masyarakat tersebut. Hal ini harus menjadi perhatian regulator dan pengawas sektor keuangan, dalam hal ini pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Gambar 1. 6 *Financial Deepening* di Indonesia Tahun 2018-2023 (Persen)

Sumber: World Bank

Berdasarkan gambar 1.6, kondisi *financial deepening* atau pendalaman keuangan di Indonesia mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 kondisi *financial deepening* di Indonesia sebesar 38,82 persen. Selanjutnya pada tahun 2019

kondisi *financial deepening* mengalami penurunan dengan angka 38,76 persen. Kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 44,72 persen dan mengalami kenaikan kembali mencapai 46,36 persen pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022 dan 2023, kondisi pendalaman keuangan Indonesia kembali menurun secara berturut-turut dengan angka 43,54 persen dan 42,25 persen. Sektor keuangan ini harus terus didorong agar lebih dalam, stabil, dan inklusif. Pendalaman keuangan ini dibutuhkan untuk mendorong pemerataan pendapatan dan memenuhi kebutuhan pembiayaan proyek infrastruktur yang nantinya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Melihat seberapa pentingnya peranan pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan suatu negara, kita harus meminimalisir hal-hal yang dapat membuat perekonomian tidak stabil. Berdasarkan latar belakang di atas, Indonesia sebagai negara berkembang yang tergabung dalam G20 memiliki perekonomian yang cukup rendah jika dibandingkan dengan negara lainnya. Kemudian naik turunnya nilai beberapa faktor yang diindikasikan dapat meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi yaitu investasi asing, pengeluaran pemerintah, tenaga kerja, serta *financial deepening* belum bisa dikatakan sebuah pertanda terjadinya peningkatan yang baik tanpa diiringi dengan nilai pertumbuhan ekonomi yang stabil. Di sisi lain, adanya perbedaan penelitian-penelitian terdahulu juga membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Investasi Asing, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja, dan

Financial Deepening terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2000-2023”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh investasi asing, pengeluaran pemerintah, tenaga kerja, *financial deepening*, dan *dummy* Covid-19 secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2000-2023?
2. Bagaimana pengaruh investasi asing, pengeluaran pemerintah, tenaga kerja, *financial deepening*, dan *dummy* Covid-19 secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2000-2023?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh investasi asing, pengeluaran pemerintah, tenaga kerja, *financial deepening*, dan *dummy* Covid-19 secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2000-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh investasi asing, pengeluaran pemerintah, tenaga kerja, *financial deepening*, dan *dummy* Covid-19 secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2000-2023.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi terutama dalam pengembangan ilmu yang mendalam mengenai peran investasi asing, pengeluaran pemerintah, tenaga kerja, *financial deepening*, dan Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Diharapkan dengan melakukan penelitian ini dapat menambah pemahaman bagi penulis terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu pengaruh investasi asing, pengeluaran pemerintah, tenaga kerja, *financial deepening*, dan Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan masukan terhadap pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan dan pembuatan strategi yang berkaitan dengan kemajuan perekonomian melalui masalah yang diteliti.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menambah pengetahuan bagi kemajuan akademis serta sumber referensi bagi peneliti selanjutnya agar hasil penelitian menjadi lebih baik.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan sumber data dari *website* resmi Badan Pusat Statistik, *International Monetary Fund* (IMF), serta *World Bank* tahun 2000-2023.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2023-2025							
		November	Desember	Januari- Februari	Maret- September	November 2	Desember	Januari- Maret	April
									4
1	Pengajuan Outline dan Judul Skripsi								
2	Konsultasi awal dan menyusun rencana kegiatan								
3	Pengumpulan Data								
4	Penyusunan Usulan Penelitian								
5	Sidang Usulan Penelitian								
6	Revisi Usulan Penelitian								
7	Pengolahan Data dan Penyusunan Bab IV-V								
8	Sidang Skripsi, Revisi dan Pengesahan Naskah Skripsi								